

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia. Namun pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga kepulauan-pulau terpencil di wilayah perbatasan. Pulau-pulau ini belum tersentuh oleh proses pembangunan, aksesibilitas keluar masih sangat sulit, dan bahkan beberapa diantaranya mulai mengadopsi budaya dari negara tetangga. Akibatnya tidak jarang masyarakat pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal dari kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari daerah lain (Kusumastanto, 2003). Wilayah gugusan pulau-pulau terpencil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang cukup luas, sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Padahal, jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau terpencil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Menurut Budiharsono (2008) wilayah kepulauan dapat dikembangkan menjadi tempat pengelolaan sumberdaya lautan yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Secara umum dalam pengembangan potensi kelautan yang sangat besar memiliki banyak kendala, antara lain : (1) Pemerintah dan masyarakat masih terkonsentrasi pada eksplorasi daratan, (2) Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kepulauan khususnya tentang kelautan membutuhkan teknologi tinggi, (3) Kualitas sumberdaya manusia kepulauan relatif masih rendah, (4) Teknologi yang terkait dengan perikanan laut masih belum banyak terjangkau nelayan kelas bawah, serta, (4) Sistem kelembagaan pendukung

pengembangan sektor kelautan belum tersedia dengan baik. Kendala-kendala tersebut diatas juga dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep dalam pengembangan wilayah kepulauan.

Orientasi pembangunan Kepulauan Kabupaten Sumenep pada kesejahteraan masyarakat merupakan indikasi kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat serta kemajuan dan keberdayaan masyarakat. Komitmen perbaikan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diidentikkan sebagai garansi politik dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk konsisten mengupayakan pencapaiannya secara bertahap dan berkelanjutan. Indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat penyelesaian masalah-masalah masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan aksesibilitas masyarakat dapat mandiri secara sosial, ekonomi dan politik.

Mengacu pada teori Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP), Munir R dan Fitanto, 2007) maka perencanaan pembangunan perekonomian di kabupaten Sumenep diusahakan untuk: (1). Memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, (2). Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan guna pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; (3). Peningkatan pendidikan, iptek serta kesehatan sebagai proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, terampil dan produktif dilandasi nilai agama dan budaya; (4). Percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah kepulauan dan daratan secara proporsional serta Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; (5). Pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat; dan (6). Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

Kabupaten Sumenep memiliki potensi di sektor perikanan yang cukup memadai khususnya di Kepulauan. Keberadaan perikanan seharusnya dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada, karena sektor perikanan telah dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. Keunggulan sektor perikanan akan didapat nilai tambah yang tinggi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan di 9 Kecamatan Kepulauan Sumenep dapat dilihat masing-masing kontribusinya, seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Sumenep khususnya daerah Kepulauan

Kecamatan	2012			2013		
	Subsektor Perikanan	Subsektor pertanian Lainnya	Kontribusi	Subsektor Perikanan	Subsektor pertanian lainnya	Kontribusi
Giligenting	24.425,85	18.953,43	56,31	25.566,06	19.641,38	56,55
Talango	20.800,41	38.866,12	34,86	21.781,65	39.386,05	35,61
Nonggunong	43.019,15	44.202,22	49,32	44.595,36	45.202,46	49,66
Gayam	35.109,83	75.309,92	31,80	36.730,97	78.930,44	31,76
Raas	41.441,42	40.645,10	50,49	43.436,63	43.129,64	50,18
Sapeken	74.857,11	43.153,51	63,43	77.837,96	45.729,83	62,99
Arjasa	21.887,79	153.379,48	12,49	22.910,53	165.424,97	12,16
Kangayan	25.568,52	51.776,95	33,06	26.817,61	55.782,08	32,47
Masalembu	69.649,19	31.321,53	68,98	72.290,89	32.303,06	69,12

Sumber :BPS, Indikator Makro Ekonomi Sumenep (PDRB Kecamatan) tahun 2014

Kontribusi terbesar dari Subsektor perikanan terhadap sektor pertanian di Kepulauan Sumenep yaitu Kecamatan Masalembu dengan kontribusi 69,12%. Peringkat kedua yaitu Kecamatan Sapeken dengan kontribusi 62,99%. Dan peringkat ketiga adalah Kecamatan Giligenting dengan kontribusi 56,55%. Dan peringkat keempat adalah Kecamatan Raas dengan kontribusi 50,18%, sedangkan kecamatan yang lainnya seperti Kecamatan Nonggunong, Talango,

Kangayan, Gayam dan Arjasa kontribusi subsektor perikanannya terhadap sektor pertanian dibawah 50%. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011, pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dianggap belum optimal. Sehingga diperlukan pengembangan potensi perikanan dan kelautan untuk berkontribusi lebih besar pada PDRB.

Menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan seiring bergulirnya otonomi daerah yang menyebabkan ketidak seimbangan pertumbuhan dan perkembangan produk-produk unggulan pada suatu wilayah, akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan pada tiap wilayah di Kabupaten Sumenep. Sehingga perlu adanya peningkatan nilai tambah sektor perikanan melalui pengembangan industri berbasis perikanan berdasar ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan DKP Kabupaten Sumenep dalam angka 2013. Produksi ikan dari 9 kecamatan di Kepulauan Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dapat di sajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Produksi ikan menurut Kecamatan dan sub sektor perikanan di Kepulauan Kabupaten Sumenep 2013

NO	Kecamatan	Produksi ikan laut (ton)	Produksi ikan payau (ton)	Produksi ikan Tawar (ton)	Produksi ikan Perairan umum (ton)
1	Talango	1.232,86	-	1.80	-
2	Giligenting	1.459,32	-	-	-
3	Nonggunong	2.543,66	-	-	-
4	Gayam	2.069,44	-	-	-
5	Raas	2.442,49	-	-	-
6	Sapeken	4.357,30	-	-	-
7	Arjasa	1.013,43	108,64	19.15	-
8	Kangayan	1.511,60	-	-	-
9	Masalembu	4.063,20	-	-	-
	Jumlah total	17.693,30	108,64	20.95	-

Sumber : Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep dalam angka,2014

Peringkat pertama produksi ikan di kepulauan Kabupaten Sumenep secara total keseluruhan yaitu kecamatan Sapeken dengan kontribusi pasokan ikan menurut jenisnya sebesar 4.358,30 ton pada tahun 2013 atau prosentasenya mencapai 24,63%. Peringkat kedua produksi ikan di Kepulauan Kabupaten Sumenep yaitu Kecamatan Masalembu dengan kontribusi pasokan sebesar 4.063,30 ton pada tahun 2013 atau prosentasenya mencapai 22,96%. Sedangkan hasil produksi ikan yang paling rendah di Kepulauan kabupaten Sumenep adalah Kecamatan Arjasa dan Talango dengan kontribusi pasokan masing-masing sebesar 1.141,22 ton dan 1.234,66 ton pada tahun 2013 atau prosentase masing-masing mencapai 6,40% dan 6,93%.

Pembangunan industri tidak hanya industri besar dengan teknologi canggih saja, akan tetapi perlu dikembangkan juga industri kecil dan rumah tangga yang kebanyakan berada di pedesaan. Pengembangan dari industri kecil dan rumah tangga akan menjadi lebih efektif karena selain memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha juga dapat mendorong pembangunan daerah.

Industri di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Karena peran industri pedesaan yang demikian, maka pengembangan industri pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan (Mubyarto, 1986).

Perkembangan industri di Kabupaten Sumenep perlu dibenahi agar nantinya peningkatan jumlah industri mampu menyerap tenaga kerja dan mengoptimalkan produksi.

Tabel 1.3
Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Nilai Produksi, Nilai Investasi dan Nilai Ekspor di Kabupaten Sumenep 2009-2011

No.	Uraian	Satuan	2009	2010	2011
1	Jumlah Usaha	Unit	4.853	5.157	5.952
2	Jumlah Tenaga Kerja	Jiwa	20.290	21.313	30.908
3	Jumlah Nilai Produksi	Juta	32.689,98	92.179,18	93.160,26
4	Jumlah Nilai Investasi	Juta	3.288,28	4.161,30	4.117,58
5	Jumlah Nilai Ekspor	Juta	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep, 2012

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi dari tahun 2009 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan, akan tetapi nilai ekspor tidak ada. Sedangkan jumlah nilai investasi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2011.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan peran-peran teknologi lokal yang berkelanjutan. Sebaliknya, implikasi dari tidak terbendungnya teknologi dengan orientasi industri telah merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Paradigma berfikir masyarakat cenderung berorientasi pada penguasaan sumber daya, individualistis serta tidak lagi peka terhadap norma-norma lingkungan. Seluruh sumber daya di eksplorasi secara besar-besaran tanpa memikirkan keberlanjutannya. Beberapa riset membuktikan ternyata teknologi canggih telah membantu mempercepat pengelolaan sumber daya alam dengan orientasi ekonomi kapitalis. Hal ini akan terus mengalir jika tidak ada upaya untuk membendung pesatnya kemajuan teknologi yang tidak membumi tersebut. Peran serta pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dinilai sangat penting untuk saat ini.

Pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep sangat memungkinkan untuk dilakukan, misalnya program pemberdayaan adopsi pulau sangatlah penting, sebab akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di kecamatan Talango kepulauan Sumenep. Pengembangan

ekonomi dengan nilai produksi perikanan. Hal itu didukung data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2012-2013) menunjukkan bahwa nilai produksi Perikanan di Kabupaten Sumenep yaitu 18.773.92 ton dan 18.858,42 ton. Pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Talango hanya dengan pengeringan. Hasil perikanan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep terutama masyarakat pedesaan .

Pemanfaatan Perikanan bisa ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan menggunakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya setempat. Penggunaan teknologi tepat guna ini diharapkan dapat berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah kepulauan yang selama ini pertumbuhannya relatif lambat jika dibandingkan dengan wilayah daratan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perencanaan kebutuhan teknologi tepat guna untuk pengembangan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis perikanan Kepulauan Sumenep khususnya Kecamatan Talango?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis perikanan di Kepulauan Sumenep Kecamatan Talango.

1.4 Manfaat

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan baru mengenai teknologi tepat guna untuk produksi perikanan di kecamatan talango Kepulauan Sumenep.

2. Bagi masyarakat Kecamatan talango Kepulauan Sumenep dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan adanya perencanaan teknologi tepat guna dapat memberikan suatu nilai tambah dari hasil produksi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidupnya.

3. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam meningkatkan perekonomian melalui pengembangan produksi. Sebab dengan adanya pengembangan produksi akan ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat Kecamatan Talango, sehingga dapat menggerakkan perekonomian lokal khususnya Kecamatan Talango.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi VI bab yaitu bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, Gambaran umum perekonomian dan UMKM, hasil dan pembahasan serta penutup. Berikut penjelasan dari masing-masing bab dalam penelitian ini.

Bab I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan tentang kondisi riil khususnya di Pulau Talango dan Kabupaten Sumenep pada umumnya beserta permasalahan yang

ada pada masyarakat. Rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang merupakan titik permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan kelanjutan penelitian ini apakah dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Sistematika penulisan merupakan intisari dari susunan dan struktur hasil penelitian.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III: METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, penentuan informan, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

Bab IV: Gambaran umum, perekonomian dan UMKM

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, kondisi perekonomian, kebutuhan UMKM akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta analisis situasi UMKM wilayah kepulauan Sumenep

Bab V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi analisis hasil penelitian mengenai teknologi tepat guna untuk Usaha mikro kecil menengah di Kepulauan Talango Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara.

Bab V: PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.